

# Minta Kejati Ambil Alih Kasus Korupsi

Singkawang, BERKAT.

Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kota Singkawang, kembali bakal menyuarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pihak terkait untuk mengusut dugaan penyimpangan dana (korupsi), pada sejumlah proyek yang dibiayai APBNP dan APBD tahun anggaran (TA) 2008-2010 di Kota Singkawang.

Tak hanya itu, LAKI Singkawang juga mendesak agar kasus korupsi Singkawang yang terkesan menguap sejak 2008 langsung ditangani Kejati Kalbar.

Alasannya, institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan negeri yang telah silih berganti kepemimpinan hingga kini terkesan enggan 'menyentuh' kasus korupsi di daerah ini. Seringkali penanganan kasus-kasus korupsi di daerah ini oleh kejaksaan mengecewakan dan

sangat lamban diselidiki. Demikian dituturkan Ketua LAKI Kota Singkawang, Mu'in, dalam rilisnya kepada koran ini Minggu (18/9), sekebalnya dari acara halal bihalal dengan jajanan pengurus LAKI di pusat, serta pihak KPK beberapa waktu lalu, menegaskan, para pembina LAKI di pusat siap membantu tikus-tikus yang mengerat uang rakyat itu segera dijebloskan ke bui.

Proyek-proyek yang dinilai syarat penyimpangan di antaranya MTQ Tingkat Provinsi Kalbar 2008 Rp.1.6 milyar, kasus petak sawah di Singkawang Selatan yang dikerjakan Dinas Pertanian dan Kehutanan, bangunan Pusat Informasi Pariwisata (PIP) Singkawang serta penyimpangan di Dinas BM-SDA dan ESDM Singkawang, terkait Dana Penyelesaian Infrastruktur Daerah (DPID)

Rp.10 milyar serta Rp.6 milyar, yang menggunakan rantai anggaran APBNP, ditengarai penuh rekayasa kolusi dan gratifikasi tersebut.

Menurut Mu'in, sudah seharusnya KPK bersama Kejati Kalbar mengusut dugaan adanya penyimpangan dana dari kasus-kasus yang memakai pos anggaran APBNP, DPID dan APBD di Kota Singkawang tersebut.

Minimal jika KPK dan Kejati turun tangan kasus-kasus dugaan penyimpangan yang dananya bersumber APBD dan APBNP serta DPID bisa terkuak. "Sehingga bisa jadi jalan pembuka bagi pengungkapan kasus korupsi di Kalbar khususnya," tegas Mu'in lagi.

Pria yang aktif dalam organisasi International Force Against Corruption (IFAC) yang beranggotakan lima negara yakni

Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam dan Filipina ini, mengatakan selain Kejati harus mengambil alih, peran KPK juga masih sangat dibutuhkan dalam penuntasan kasus korupsi di daerah.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Pontianak sejak 2007 terhadap pengelolaan anggaran di Singkawang ternyata bukan hanya kasus-kasus yang sekarang sedang dibidik LAKI Singkawang.

Masih banyak indikasi kerugian Negara lain yang terjadi di Singkawang yang jika ditotalkan mempunyai nilai cukup fantastis dan memang masih belum tersentuh. "Kami berharap upaya tak kenal lelah yang kita kerjakan ini endingnya nanti membawa para koruptor di daerah ini merana," ucapnya. (rud)